



Pertahankan WTP

WAKIL Ketua DPRD Kalbar Suriansyah menuturkan, opini WTP dari BPK diiringi beberapa catatan seperti masalah aset.

"Memang masalah aset di Pemprov masih lemah. Pemprov harus menanggapi masalah ini dengan segera. Sebab, di tahun 2015 peraturan untuk mendapat Opini WTP sudah sangat ketat," ujar Suriansyah, Senin (2/3).

Dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, pada 2015 ini, mendapatkan opini WTP akan lebih ketat. Pemprov harus menyiapkan data-data aset dan pembukuan

laporan keuangan dengan cara transparan.

"Kalau tidak, sulit untuk mendapatkan WTP. Kita harap Pemprov lebih berhati-hati, masalah aset dan keuangan ke depannya supaya Pemprov tetap mendapatkan opini WTP," tuturnya.

Terkait peraturan baru ini, kata Suriansyah, DPRD sudah melakukan koordinasi ke Pemprov agar bisa melakukan persiapan. "Kami juga sudah memberikan masukan ke komisi III, supaya terus memantau masalah ini," ungkapnya. (rul)